

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : IV/MPR/1973
TENTANG
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian kontinuitas program-program Pembangunan disegala bidang untuk dapat mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara itu harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun, agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dalam rangkaian kontinuitasnya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia;
 - c. Bahwa pokok-pokok penyusunan dan penguangannya haruslah mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, sehingga Garis-garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan dituangkan di dalam Pola Umum Pembangunan secara sistimatis dalam kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh;
 - d. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 3 Juli 1971 yang mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara yang didasarkan atas aspirasi dan kepribadian Bangsa Indonesia demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 6/MPR/1972;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- Memperhatikan :**
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang "Garis-garis Besar Haluan Negara " yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memperhatikan semua Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tentang perlakuan selanjutnya atas Ketetapan-ketetapan itu;
 2. Putusan Rapat Paripurna ke 5 tanggal 22 Maret 1973
SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MARET 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA.

Pasal 1.

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistematika Garis-garis Besar Haluan Negara disusun sebagai berikut :

- (a). Bab I Pendahuluan
- (b). Bab II Pola Dasar Pembangunan Nasional.
- (c). Bab III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang.
- (d). Bab IV Pola Umum Pembangunan Lima Tahun kedua.
- (e). Bab V P e n u t u p.

Pasal 2.

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat dalam Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara yang menjadi Bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 3.

Dengan adanya Ketetapan ini, semua produk-produk MPRS

- (a). Yang materinya sudah tertampung didalam Garis-garis Besar Haluan Negara ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (b). Yang materinya bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara ini, dinyatakan dicabut.
- (c). Yang materinya belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara ini, dapat diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 4.

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia /Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengemban dan melaksanakan Ketetapan ini dengan Bagian Ketetapan yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara sesuai dengan bunyi dan makna sumpah jabatannya.

Pasal 5.

Ketetapan ini disyahkan pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku pada saat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 4 Ketetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Maret 1973

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

K.H. Dr. IDHAM CHALID

Wakil Ketua

t.t.d

Drs. SUMISKUM

Wakil Ketua

t.t.d

J. NARO, S

Wakil Ketua

t.t.d.

Wakil Ketua

t.t.d.

Wakil Ketua

t.t.d.

N A S K A H**GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA****B A B I****PENDAHULUAN****A. PENGERTIAN**

1. Garis-garis Besar Haluan Negara adalah suatu Haluan Negara dalam garis-garis besar yang hakekatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Pola Umum Pembangunan Nasional tersebut merupakan rangkaian Program-program Pembangunan disegala bidang yang berlangsung secara terus menerus.
3. Rangkaian Program-program Pembangunan yang terus menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan TUJUAN NASIONAL seperti termaksud didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Negara adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia, yang pada tingkat sekarang ini sedang melakukan Pembangunan Nasional dengan tujuan, agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita Bangsa Indonesia.

C. LANDASAN

Garis-garis Besar Haluan Negara disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila dan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

D. POKOK-POKOK PENYUSUNAN DAN PENUANGAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam waktu lima tahun berikutnya, maupun dalam jangka panjang, maka

Garis-garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan dituangkan didalam Pola Umum Pembangunan Nasional secara sistimatis sebagai berikut :

1. POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
2. POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG.
3. POLA UMUM PELITA - II.

E. PELAKSANAAN

1. Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan dan atau dalam garis-garis kebijaksanaan Pemerintah.
2. Tiap lima tahun sekali Garis-garis Besar Haluan Negara ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kehidupan Rakyat dan Bangsa Indonesia.

B A B II

POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana perikehidupan Bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

B. LANDASAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan pokok pikiran bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional disegala bidang adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

C. AZAS-AZAS PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Azas Manfaat, ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan Rakyat dan bagi pengembangan pribadi Warga Negara.
2. Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, ialah bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirasi Bangsa harus merupakan usaha bersama dari Bangsa

dan seluruh Rakyat yang dilakukan secara gotong-royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

3. Azas Demokrasi, ialah Demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang Politik, Sosial dan Ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah Nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
4. Azas Adil dan Merata, ialah bahwa hasil-hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh Bangsa dan bahwa tiap-tiap Warga Negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan itu sesuai dengan nilai dharma-bhakti yang diberikannya kepada Bangsa dan Negara.
5. Azas Perikehidupan dalam keseimbangan, ialah keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan keduniaan dan akhirat, antara kepentingan materiil dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan perikehidupan darat, laut dan udara, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

D. MODAL DASAR DAN FAKTOR-FAKTOR DOMINAN

1. Modal Dasar :

Modal Dasar Pembangunan Nasional yang dimiliki oleh Rakyat dan Bangsa Indonesia ialah :

- a. Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa Indonesia.
- b. Kedudukan geografis Indonesia sepanjang garis khatulistiwa dan posisinya sebagai wilayah penghubung, serta terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera raya, dengan iklim tropika dan cuaca musim-musimnya memberikan kondisi alamiah serta kedudukan dan peranan strategis yang sangat tinggi nilainya.
- c. Sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah di darat dan di laut memberikan kehidupan Bangsa di segala bidang.
- d. Jumlah penduduk yang sangat besar, apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang.
- e. Modal Rokhaniah dan Mental, yaitu Kepercayaan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak

ternilai harganya bagi pengisian aspirasi-aspirasi Bangsa. Juga kepercayaan dan keyakinan Bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila merupakan modal sikap mental yang dapat membawa Bangsa menuju cita-citanya.

- f. Modal Budaya, yakni budaya Bangsa Indonesia yang telah berkembang sepanjang sejarah Bangsa.
- g. Potensi Efektif Bangsa, yakni segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif yang telah dicapai oleh Bangsa sepanjang sejarahnya.

2. Faktor-faktor Dominan :

Dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar pembangunan untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional dengan landasan-landasan serta azas-azas diatas, perlu diperhatikan faktor-faktor dominan sebagai berikut :

- a. Faktor demografis.
- b. Faktor geografis, hidrografis, geologis dan topografis.
- c. Faktor klimatologis.
- d. Faktor flora dan fauna.
- e. Faktor kemungkinan pengembangan.

E. WAWASAN NUSANTARA

Wawasan dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup :

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, dalam arti :

- a. Bahwa Kebulatan Wilayah Nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu Kesatuan Wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh Bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama Bangsa.
- b. Bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu Kesatuan Bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
- c. Bahwa secara psikologis, Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita Bangsa.

- d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya Falsafah serta Ideologi Bangsa dan Negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan Bangsa menuju tujuannya.
 - e. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu Kesatuan Hukum dalam arti bahwa hanya ada satu Hukum Nasional yang mengabdikan kepada Kepentingan Nasional.
- 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti :**
- a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, kehidupan Bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang serasi dengan kemajuan Bangsa.
 - b. Bahwa Budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan Budaya Bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan Budaya Bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh Budaya.
- 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti :**
- a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensiil maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang diseluruh Daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh Daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
- 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti :**
- a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu Daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh Bangsa dan Negara.
 - b. Bahwa tiap-tiap Warganegara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan Negara dan Bangsa.

BAB III

POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Berlandaskan pada Pola Dasar Pembangunan Nasional, disusunlah Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai dengan 30 tahun sebagai usaha pengarahan dalam melaksanakan pembinaan dan pembangunan Bangsa pada umumnya dalam menuju tercapainya cita-cita Nasional.

A. PENDAHULUAN

1. Kemerdekaan yang dicapai berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan melalui perjuangan Rakyat, telah memberikan kesempatan kepada Bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya, yakni suatu masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, Bangsa Indonesia mengalami gelombang pertentangan-pertentangan politik yang tajam dan rentetan pergolakan yang terus-menerus, sedangkan usaha-usaha untuk memperbaiki kehidupan sosial-ekonomi tidak ditangani dengan sungguh-sungguh sehingga keadaan ekonomi mengalami kemerosotan yang menambah dan sangat memberatkan penderitaan Rakyat banyak.
3. Setelah pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965 dapat digagalkan, berkat lindungan dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kesadaran dan keteguhan Rakyat pada landasan Falsafah Pancasila, maka Orde Baru dengan perjuangan yang sungguh-sungguh telah berhasil menciptakan stabilitas Nasional, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik, untuk selanjutnya melakukan serangkaian Pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan secara terus-menerus, terarah, bertahap dan berencana, sebagai satu-satunya jalan untuk mengisi kemerdekaan serta mencapai tujuan Nasional.

Semua usaha dan perjuangan itu akan terwujud apabila seluruh Bangsa setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Agar pelaksanaan Pembangunan Nasional dapat berjalan dengan lancar dan benar-benar mengarah dalam mencapai tujuan Nasional, perlu ditentukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969 dengan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun yang pertama dan yang selanjutnya akan disusul Pelita kedua, Pelita ketiga, Pelita keempat dan seterusnya, sehingga merupakan rangkaian Pelita yang saling sambung-menyambung dalam suatu kesatuan yang serasi.

B. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

1. Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya; bahwa pembangunan itu merata diseluruh Tanah Air; bahwa bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh Rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup.

Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup didunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir Pembangunan Nasional; secara ringkas disebut masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Pembangunan Jangka Panjang dilaksanakan secara bertahap. Adapun tujuan setiap tahap Pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.
3. Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sedangkan titik berat dalam Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan dibidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.

Pembangunan diluar bidang ekonomi tersebut dilaksanakan seirama dan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi. Sedangkan sebaliknya dengan peningkatan hasil-hasil dalam bidang ekonomi, maka tersedianya sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan dibidang-bidang sosial-budaya, politik dan pertahanan keamanan nasional.

4. Pelaksanaan Pembangunan Nasional harus berjalan bersamasama dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, baik dibidang politik maupun dibidang ekonomi, karena kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat dan kegoncangan-kegoncangan ekonomi akan menghambat pembangunan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa stabilitas nasional memperlancar pembangunan nasional dan pembangunan nasional memperkuat stabilitas nasional.

5. Pelaksanaan pembangunan disamping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh Rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka diwujudkan azas keadilan sosial sehingga disatu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan azas hidup sederhana dan wajar; bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur, melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Dilain pihak lapisan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun pula didalam menerima kembali hasil pembangunan.
6. Dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga dapat berdiri sendiri antara lain dengan peningkatan kegiatan koperasi, agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia.

Kebijaksanaan ini harus diambil dalam rangka memecahkan ketidak selarasan di dalam masyarakat, karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional, sedang dilain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan perannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional.

7. Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang disamping meningkatkan produksi nasional, maka pertumbuhan ekonomi harus mempercepat pula pertumbuhan lapangan kerja, karena pemberantasan pengangguran dengan jalan memperluas kesempatan kerja merupakan sasaran penting bagi

Pembangunan Jangka Panjang, bukan saja karena kesempatan kerja memiliki nilai ekonomis, melainkan juga karena mengandung nilai kemanusiaan dengan menumbuhkan rasa harga diri, sehingga dengan demikian memberi isi kepada azas kemanusiaan.

Untuk mengisi lapangan kerja yang akan tersedia diperlukan tenaga kerja yang memiliki kecakapan dan ketrampilan yang sesuai dengan keperluan pembangunan, sehingga perluasan lapangan kerja dan pembinaan sistim pendidikan yang sesuai dengan keperluan pembangunan, atau yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan untuk pembangunan, harus dilaksanakan secara bersama dan serasi.

8. Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Rakyat dapat terlaksana dengan cepat, harus dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana, yang mutlak harus dilaksanakan dengan berhasil, karena kegagalan pelaksanaan keluarga berencana akan mengakibatkan hasil usaha pembangunan menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan generasi yang akan datang.

Pelaksanaan keluarga berencana ditempuh dengan cara-cara sukarela, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping itu diperlukan pula usaha penyebaran penduduk yang lebih wajar melalui transmigrasi sebagai sarana dalam meningkatkan kegiatan pembangunan secara merata diseluruh tanah Air.

9. Pembangunan Jangka Panjang harus pula mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari sektor-sektor diluar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar, dan industri menjadi tulang-punggung ekonomi; bagian penduduk yang hidup dari sektor-sektor diluar pertanian semakin bertambah dan komposisi ekspor akan berubah sehingga ekspor Indonesia akan semakin banyak terdiri dari bahan-bahan yang telah diolah dan barang-barang jadi. Dengan demikian akan berarti meningkatnya ketahanan ekonomi Indonesia terhadap perubahan-perubahan keadaan alam dan kegoncangan-kegoncangan ekonomi dunia.
10. Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasionil. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan

dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

11. Pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap.

Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan Pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa-jasa. Pengerahan dari dana-dana investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap tersebut semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan.

12. Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorientasi dan management. Maka selama Indonesia belum memiliki sendiri faktor-faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus-menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.
13. Pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat; tetap memberikan kesempatan kerja yang banyak, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menggunakan alat-alat yang sebanyak mungkin dihasilkan sendiri dan mampu untuk dipelihara sendiri, mendukung tercapainya sasaran pembangunan dan mempertinggi ketrampilan untuk menggunakan teknologi yang lebih maju dikemudian hari.
14. Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Demokrasi Ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, karenanya tidak mengenal sistem pertentangan kelas.
- b. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula.
- c. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- d. Warganegara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- e. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- f. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warganegara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- g. Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.

Dalam Demokrasi Ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut

- a. Sistem "free fight liberalism" yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dan yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
 - b. Sistem "etatisme" dalam mana Negara beserta aparaturnya dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.
 - c. Monopoli yang merugikan masyarakat.
15. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam berbagai bidang dengan pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang adalah sebagai berikut :

a. **Bidang Ekonomi.**

Struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan dan kekuasaan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Dengan prinsip bahwa Repelita yang terdahulu mempunyai sasaran untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan Rakyat banyak serta untuk menciptakan landasan bagi Repelita berikutnya, maka struktur ekonomi yang seimbang itu akan dapat dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan serangkaian Repelita-Repelita ialah :

- Repelita pertama : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.
- Repelita kedua : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
- Repelita ketiga : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
- Repelita keempat : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya.

Dengan peningkatan bidang industri dan pertanian secara bertahap seperti tersebut diatas, akan tercapailah struktur ekonomi yang seimbang, ialah struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri yang didukung oleh bidang pertanian yang kuat, setelah dilampai Pembangunan Lima Tahun yang kelima atau yang keenam yang akan menjadi landasan bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional, ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

b. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Sosial-Budaya.

Atas dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam sekitarnya serta memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong-royong yang berkembang, sehingga sanggup serta mampu untuk melanjutkan perjuangan Bangsa dalam mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan landasan ekonomi yang seimbang.

Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan Pribadi Manusia Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan. Sedangkan kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai yang luhur sehingga tidak dipisahkan dari Manusia Budaya Indonesia sebagai pendukungnya.

www.tatanusa.co.id

c. Bidang Politik

Dalam bidang politik dalam negeri dimantapkan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap Warga Negara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran itu termasuk didalamnya usaha-usaha untuk menciptakan, mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi untuk memungkinkan terlaksananya proses-proses pembaharuan kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional.

Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera.

d. Bidang Pertahanan Keamanan Nasional

Berlandaskan pada doktrin keamanan nasional, menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu mensukseskan dan mengamankan perjuangan nasional pada umumnya, pembangunan nasional pada khususnya dari setiap ancaman yang datang dari luar negeri serta dari dalam negeri, sehingga benar-benar aman dan tertib usaha Bangsa dalam mencapai tujuan nasional.

C. CATATAN DASAR

Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang ini merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Jangka Menengah, yaitu Pola Umum Pembangunan Lima tahun yang penyusunannya berupa Repelita diserahkan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB IV

POLA UMUM PELITA KEDUA

A. PENDAHULUAN

1. Dengan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Pelita pertama dan makin kuatnya stabilitas nasional, maka makin lapanglah jalan yang akan ditempuh untuk melaksanakan Pelita kedua.

Dalam Pelita kedua akan digarap secara lebih dalam masalah-masalah yang sejak semula disadari belum akan terpecahkan dalam Pelita pertama, seperti misalnya masalah-masalah perluasan kesempatan kerja, pembagian kembali hasil-hasil pembangunan secara merata, usaha perbaikan struktur pasar yang masih pincang, peningkatan laju perkembangan ekonomi didaerah-daerah, transmigrasi, peningkatan partisipasi Rakyat dalam pembangunan melalui koperasi, perhatian lebih pada masalah-masalah pendidikan serta faktor-faktor non ekonomis lainnya.

2. Berdasarkan motivasi adanya masalah-masalah seperti tersebut di atas, maka Pelita kedua ini akan merupakan kelanjutan dan peningkatan Pelita pertama dan kebijaksanaan operasionalnya harus benar-benar terarah dan merupakan kesatuan yang lengkap dan serasi.
3. Pelita kedua meliputi jangka waktu 1 April 1974-31 Maret 1979 dan merupakan tahap kedua pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang.

B. TUJUAN

Sebagaimana halnya dengan setiap tahap pembangunan dalam rangka Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, maka tujuan Pelita kedua ialah :

- Pertama : meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat;
Kedua : meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

C. PRIORITAS

1. Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang maka dalam Pelita kedua prioritas adalah pembangunan ekonomi dengan titik berat pembangunan sektor pertanian dan peningkatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

2. Pemberian prioritas kepada bidang ekonomi tidak berarti mengabaikan pembangunan bidang-bidang lain, yang juga tetap dikembangkan dan menunjang pembangunan ekonomi.

Kemajuan ekonomi yang dicapai dalam Pelita pertama memberikan kesempatan dan kemampuan yang lebih besar dalam Pelita kedua untuk memecahkan berbagai masalah sosial, yang pemecahannya tetap diletakkan dalam keseluruhan pelaksanaan pembangunan.

3. Sementara itu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis terus dikembangkan/ditingkatkan dengan makin menyetatkan pertumbuhan Demokrasi Pancasila, memperkuat kehidupan kontitusional dan meningkatkan tegaknya hukum; yang sekaligus juga berarti mendorong berkembangnya kreativitas masyarakat, kegairahan hidup dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
4. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama pada terlaksananya pembangunan ekonomi.

D. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

a. Bidang Ekonomi.

UMUM

1. Segala kegiatan pembangunan selama Repelita pertama harus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan dalam Repelita kedua. Peningkatan pembangunan berarti bertambahnya produksi barang dan produksi jasa dengan laju yang lebih cepat. Dalam hubungan ini pembangunan dibidang pertanian harus tetap diteruskan dan bahkan diperluas, sehingga bidang pertanian tetap menjadi landasan bagi pembangunan tahap-tahap berikutnya.
2. Dalam pelaksanaan Repelita kedua maka usaha untuk meningkatkan pertumbuhan produksi, usaha meratakan penyebaran hasil-hasil produksi serta usaha memperluas kesempatan kerja harus berjalan bersama dan seimbang.

Sementara itu terus ditingkatkan usaha-usaha untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang ada guna pembangunan nasional dengan membina swadaya dan merangsang prakarsa serta partisipasi aktif seluruh masyarakat.

3. Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usahausaha untuk lebih meratakan pembagian kembali hasil pembangunan, baik berupa penyebaran yang lebih merata dari pada pelaksanaan pembangunan keseluruh

daerah maupun berupa peningkatan penghasilan anggota masyarakat karena kegiatan mereka yang produktif.

4. Usaha meratakan penyebaran hasil pembangunan dituangkan dalam program-program yang kongkrit, yang salah satu bentuknya berupa pemberian perhatian khusus terhadap pembangunan daerah-daerah minus sebagai akibat sedikitnya kekayaan alam yang ada di daerah tersebut, sehingga rakyat di daerah-daerah tersebut yang merupakan golongan penduduk yang miskin akan memperoleh kesempatan untuk membangun daerahnya dan dengan demikian menikmati pula hasil pembangunan.
5. Usaha-usaha lain untuk meratakan penyebaran hasil pembangunan dilakukan melalui program-program tersendiri yang akan dapat meningkatkan penghasilan kelompok-kelompok masyarakat yang memperoleh mata pencaharian dalam pekerjaan-pekerjaan yang masih sangat rendah tingkat penghasilannya, seperti para nelayan, pekerja-pekerja dalam kerajinan rakyat, petani-petani penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri, petani-petani yang memiliki tanah terlalu kecil dan sebagainya.
6. Usaha meratakan hasil pembangunan harus pula mencakup program untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, dalam rangka memperluas pengikut-sertaan golongan ekonomi lemah dalam ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar, dengan jalan mengusahakan kesempatan untuk dapat memperkuat permodalannya, meningkatkan keahliannya untuk mengurus perusahaannya dan kesempatan untuk memasarkan hasil produksinya. Dalam hubungan ini koperasi sebagai salah satu wadah penghimpun kekuasaan ekonomi lemah akan lebih ditingkatkan peranan serta kemampuannya melalui program yang menyeluruh, dengan mengutamakan koperasi-koperasi produksi dibidang-bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan rakyat dan kerajinan tangan.
7. Penyebaran yang merata daripada hasil pembangunan juga akan diwujudkan melalui kebijaksanaan yang serasi dibidang perpajakan dan perkreditan.

Dalam hubungan ini, maka pajak langsung dalam bentuk pajak pendapatan dan pajak kekayaan mempunyai peranan yang sangat penting. Dana kredit bank dalam jumlah yang masing-masing tidak terlalu besar akan disebarkan dan dipergunakan untuk peningkatan usaha-usaha menengah dan kecil.

Sistem kredit BIMAS disertai penyuluhan yang intensif mengenai teknik produksi dan pemasarannya serta penyediaan sarana produksi perlu

diusahakan perluasannya bagi bidang-bidang usaha lain, seperti produksi palawija, kerajinan rakyat, industri kecil serta menengah dan sebagainya.

8. Dalam Repelita kedua perluasan lapangan kerja merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Pemecahan terhadap masalah ini juga berarti memperluas lapisan masyarakat yang secara produktif ikut serta dalam pembangunan dan pada akhirnya juga mengandung arti makin meluasnya lapisan masyarakat yang ikut mengambil tanggung jawab dalam pembangunan.
9. Dalam rangka usaha memperluas lapangan kerja perlu digariskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyeluruh pada semua sektor, seperti pemilihan teknologi, pendidikan ketrampilan, pembangunan industri, pembangunan prasarana, penentuan skala investasi, kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan serta perkreditan dan sebagainya.
10. Peningkatan pembangunan pedesaan akan mencegah derasnya perpindahan penduduk ke kota-kota besar.

Disamping itu perluasan kesempatan kerja juga perlu dituangkan dalam program-program khusus antara lain pembangunan proyek-proyek INPRES dan proyek-proyek padat karya di daerah-daerah pedesaan yang kenyataannya merupakan sumber tenaga kerja yang besar.

11. Pembukaan daerah-daerah yang jarang penduduknya diluar pulau Jawa disamping membangkitkan potensi-potensi ekonomi yang sangat luas juga akan menambah terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas.

Oleh karena itu maka transmigrasi, termasuk transmigrasi lokal, harus digerakkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh secara terarah dan dikaitkan dengan kegiatan pembangunan daerah. Disamping transmigrasi yang langsung digerakkan oleh Pemerintah maka transmigrasi spontan akan lebih terdorong dengan makin meluasnya pembangunan dan kegiatan ekonomi diluar Jawa.

12. Salah satu aspek dalam pembangunan ekonomi ialah penggunaan tanah; oleh karena itu demi peningkatan efisiensinya perlu diadakan perencanaan penggunaan tanah (land-use planning).

13. Dalam usaha memelihara stabilitas ekonomi perlu diikuti secara seksama perkembangan-perkembangan dan kemungkinan gejolak ekonomi internasional yang mungkin terjadi dalam jangka waktu Pelita kedua sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindarkan atau membatasi akibat-akibat kegoncangan ekonomi internasional terhadap pelaksanaan Pembangunan Nasional.

14. Untuk melaksanakan Pembangunan Nasional diperlukan dana pembangunan dalam jumlah besar. Apalagi mengingat bahwa Pembangunan Nasional adalah pembangunan yang semakin meningkat, maka diperlukan usaha untuk semakin menggerakkan dana-dana pembangunan, baik melalui peningkatan penerimaan Negara maupun melalui peningkatan tabungan masyarakat.
15. Disamping dana dalam bentuk rupiah maka perlu juga dana dalam bentuk devisa, terutama untuk keperluan impor alat-alat produksi dalam jumlah yang semakin besar yang dibutuhkan dalam pembangunan. Dalam hubungan ini maka perlu ditingkatkan usaha untuk memperbesar penerimaan devisa bagi keperluan Pelita kedua dengan segala daya-upaya dalam bidang-bidang ekspor dan pariwisata.
16. Guna pelaksanaan Pelita kedua dan peningkatan stabilitas yang telah dicapai selama ini harus diambil kebijaksanaan-kebijaksanaan integral yang mencakup kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter, budget, fiskal, perkreditan, harga, upah, perdagangan dan sebagainya disertai dengan penyempurnaan-penyempurnaan intitusional.
17. Peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi akan menghasilkan bertambah besarnya penerimaan Negara, yang berarti makin banyaknya fasilitas sosial yang dapat disediakan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial tersebut kepercayaan Rakyat kepada arti pembangunan akan bertambah besar dan lahirlah kekuatan yang lebih besar untuk melanjutkan pembangunan tahap berikutnya.

P E R T A N I A N

1. Memelihara kelangsungan peningkatan produksi beras yang telah dicapai dalam Pelita pertama dengan tujuan mencukupi kebutuhan pangan serta menjamin meratanya penyebaran kepada masyarakat pada tingkat harga yang menguntungkan petani produsen dan tidak memberatkan konsumen.
2. Hasil-hasil pertanian yang lain, seperti palawija, hortikultura, hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil peternakan dan hasil-hasil perikanan perlu ditingkatkan.

Perluasan berbagai macam produksi itu disamping meningkatkan penghasilan petani juga akan membantu pertambahan penyediaan protein serta untuk memperkuat ekspor sehingga tidak terlalu tergantung pada beberapa jenis barang saja.

3. Pembangunan dalam bidang kehutanan disamping memanfaatkan hasil-hasilnya untuk pembangunan, perlu meletakkan perhatian pada pembinaan sumber-sumber alam dari hutan. Dalam rangka itu maka perlu dilakukan usaha-usaha penertiban penebangan hutan, penanaman kembali hutan-hutan bekas tebangan, hutan-hutan yang rusak serta konversi sebagian hutan-hutan alam menjadi hutan buatan yang menghasilkan kayu industri.
4. Pembangunan dibidang rehabilitasi tanah-tanah kritis, disamping ditujukan untuk membantu para petani dalam meningkatkan partisipasinya kepada pembangunan pertanian, juga ditujukan untuk mempertahankan sumber-sumber air dan sumber-sumber alam lainnya.

Oleh karena itu usaha dibidang penghijauan serta rehabilitasi tanah-tanah kritis tersebut perlu ditingkatkan.

INDUSTRI

1. Hasil-hasil pembangunan dalam bidang industri yang telah dicapai dalam Pelita pertama harus dilanjutkan dengan lebih meningkatkan lagi pembangunan industri-industri yang mengolah berbagai macam bahan mentah menjadi bahan baku serta dimungkinkan pula peningkatan usaha-usaha untuk dimulainya pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi.

Dengan demikian maka ekspor Indonesia akan bergeser dari ekspor bahan mentah kearah ekspor bahan-bahan yang telah diolah di dalam negeri.

2. Usaha pengembangan industri adalah bagian dari langkah jangka panjang untuk merombak struktur ekonomi Indonesia dari sruktur ekonomi yang terlalu berat sebelah kepada produksi bahan mentah dan hasil-hasil pertanian, kearah struktur ekonomi yang lebih berimbang.
3. Dalam mewujudkan pembangunan industri perlu didorong inisiatif dan usaha swasta sejauh mungkin, sedang Pemerintah lebih memusatkan perhatiannya pada pembangunan prasarana dan penciptaan iklim yang menunjang pertumbuhan industri.

Dalam hubungan ini perlu diusahakan pengembangan ketrampilan dan kecakapan management pengusaha-pengusaha nasional.

4. Langkah-langkah lain untuk meningkatkan pembangunan industri adalah berupa pembangunan wilayah-wilayah industri. Disamping itu, dengan tetap memperhatikan azas efisiensi perusahaan, penyebaran industri kedaerah-daerah harus semakin didorong. Dalam seluruh usaha peningkatan

pertumbuhan industri tidak membawa akibat rusaknya lingkungan hidup manusia.

PERTAMBANGAN

Pembangunan dalam bidang pertambangan adalah dalam rangka melanjutkan hasil-hasil yang telah dicapai dengan meningkatkan pengolahan berbagai macam bahan mentah, sehingga dengan demikian penghasilan Negara yang diperoleh dari hasil produksi dan hasil ekspor bidang pertambangan akan bertambah.

PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

Peningkatan laju pembangunan disamping meningkatkan produksi barang-barang juga harus meningkatkan produksi jasa-jasa diberbagai sektor antara lain sektor perhubungan dan telekomunikasi. Peningkatan produksi jasa dalam sektor perhubungan dan telekomunikasi kecuali akan memperlancar arus barang dan manusia juga mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam membina kesatuan Bangsa dan Negara.

Oleh karena itu maka dalam Pelita kedua pembangunan sektor perhubungan dan telekomunikasi perlu ditingkatkan.

PRASARANA

Pembangunan irigasi, listrik, jalan-jalan dan prasarana-prasarana lainnya harus ditingkatkan untuk dapat mendukung dan mencukupi peningkatan pertumbuhan produksi barang dan jasa.

PERUMAHAN

1. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan Rakyat, disamping penyediaan pangan dan sandang pada tingkat harga yang wajar serta perluasan lapangan kerja, maka pembangunan perumahan rakyat merupakan sasaran yang penting.

Oleh karena itu maka dalam Pelita kedua masalah pembangunan perumahan rakyat harus memperoleh perhatian sepenuhnya.

2. Sehubungan dengan pembangunan dalam bidang perumahan maka perlu ditingkatkan dan dilaksanakan hasil-hasil yang telah dicapai dalam bidang riset bahan-bahan bangunan yang memenuhi syarat kesehatan, cukup kuat dan relatif murah, dibuat dari bahan-bahan yang terdapat di Indonesia, dengan usaha-usaha untuk memproduksi bahan bangunan dan perumahan dalam jumlah yang besar dan dengan harga yang dapat dicapai oleh kemampuan membeli dari rakyat banyak.

Dalam mengatasi masalah pembiayaan diusahakan usaha sistem pembiayaan yang lebih efektif dan dapat mendorong terhimpunnya modal untuk pembangunan perumahan.

3. Disamping semua itu diusahakan perluasan penyuluhan untuk meningkatkan ketrampilan rakyat dalam teknik pembangunan perumahan serta kegiatan penyuluhan dalam rangka pemugaran perumahan dan lingkungan desa, agar makin banyak Rakyat yang mendiami rumah yang sehat dalam lingkungan yang sehat pula.

Selanjutnya perlu pula dipersiapkan unsur-unsur kelembagaan yang akan memberikan pengarahan yang tepat dalam bidang pembangunan perumahan dalam ruang lingkup nasional.

PEMBANGUNAN DAERAH

1. Untuk menjamin agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan serasi perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional (daerah).

Oleh karena itu didalam Pelita kedua disamping usaha meningkatkan pembangunan sektor-sektor yang masing-masing berlangsung diberbagai daerah, harus pula ditingkatkan pembangunan daerah-daerah yang masing-masing mencakup berbagai sektor.

Dalam hubungan ini perlu dipahami kemampuan dan potensi masing-masing daerah serta masalah-masalah mendesak yang dihadapi, sehingga usaha-usaha pembangunan yang berlangsung dalam tiap-tiap daerah benar-benar sesuai dengan keadaan masing-masing daerah.

2. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional harus juga diusahakan keserasian laju pertumbuhan antar daerah, yang antara lain dilakukan dengan memberi bantuan dan rangsangan untuk meningkatkan pembangunan kepada daerah-daerah yang relatif lebih terkebelakang.
3. Untuk pelaksanaan peningkatan pembangunan daerah diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi aktif. Dengan memperhatikan kemampuan Daerah maka perlu ditingkatkan pendapatan Daerah baik dengan pemungutan yang intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber keuangan baru. Dalam rangka ini harus diusahakan peningkatan kemampuan serta perbaikan aparatur Pemerintah Daerah.

4. Dalam melaksanakan Pembangunan Daerah harus tetap diperhatikan pembinaan Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi.

Dalam hubungan ini maka kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai pelaksanaan Pembangunan Daerah harus menunjang peningkatan pembinaan kesatuan ekonomi tersebut.

b. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, Sosial - Budaya.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP

TUHAN YANG MAHA ESA

1. Atas dasar Kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Falsafah Pancasila.
2. Pembangunan Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan untuk pembinaan suasana hidup rukun diantara sesama ummat beragama sesama penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antara semua ummat beragama dan semua penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan amal dalam bersama-sama membangun masyarakat.
3. Diusahakan bertambahnya sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan Keagamaan dan kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan Agama yang dimasukkan kedalam kurikulum disekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.
4. Melanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi ummat Islam sesuai dengan ajaran Agama Islam, dan sesuai pula dengan kemampuan masyarakat.

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

1. Salah satu perwujudan dari pada usaha mencapai keadilan sosial adalah dengan mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap Warga Negara untuk mendapatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada.

Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan pemupukan kemampuan tenaga kerja bagi keperluan pembangunan, serta untuk meningkatkan terwujudnya kesejahteraan rakyat.

2. Usaha-usaha meningkatkan perbaikan kesehatan rakyat ditujukan kepada peningkatan usaha pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat, peningkatan nilai gizi makanan rakyat, peningkatan pengadaan air minum, melindungi rakyat terhadap bahaya narkotika dan penggunaan obat-obatan lain yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku, pengadaan obat-obatan secara merata pula, memperluas pelayanan kesehatan melalui pusat-pusat kesehatan masyarakat terutama didaerah pedesaan dan meningkatkan berbagai penerangan tentang kesehatan rakyat.
3. Pelaksanaan program Keluarga Berencana terutama di Jawa dan Bali perlu ditingkatkan, khususnya agar dapat mencapai masyarakat pedesaan seluas-luasnya.

Disamping itu kesempatan untuk melaksanakan Keluarga Berencana didaerah-daerah lain perlu mulai dikembangkan sehingga membantu peningkatan kesejahteraan keluarga di daerah-daerah tersebut melalui tersedianya fasilitas-fasilitas Keluarga Berencana.

Sasaran Keluarga Berencana hendaknya meliputi seluruh lapisan masyarakat atas dasar sukarela.

Oleh karena kesediaan untuk melaksanakan Keluarga Berencana pada akhirnya adalah suatu proses perubahan sikap hidup masyarakat, maka dalam Pelita kedua kegiatan pendidikan dan latihan Keluarga Berencana tidak hanya terbatas pada pendidikan dan latihan para tenaga pelaksana teknis program Keluarga Berencana, melainkan akan makin dikembangkan pula usaha-usaha pendidikan masalah kependudukan.

4. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran program Keluarga Berencana dalam Pelita kedua, maka koordinasi antar Departemen, kegiatan-kegiatan penerangan, penelitian mengenai motivasi dan sebagainya, serta kegiatan-kegiatan penerangan, penelitian mengenai motivasi dan sebagainya, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang pelaksanaan program Keluarga Berencana perlu lebih ditingkatkan lagi.

PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PEMBINAAN GENERASI MUDA.

1. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh Rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.

Pembangunan dibidang pendidikan didasarkan atas Falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung-jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Untuk mencapai cita-cita tersebut maka kurikulum disemua tingkat pendidikan, mulai dari Taman kanak-kanak sampai perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta harus berisikan pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan Jiwa dan Nilai-nilai 1945 kepada Generasi Muda.
3. Peningkatan peranan Perguruan-perguruan Tinggi dalam usaha Pembangunan diarahkan untuk :
 - a. Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai pusat pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Mendidik mahasiswa-mahasiswa berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung-jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara Indonesia.
 - c. Menggiatkan mahasiswa sehingga bermanfaat bagi usaha-usaha Pembangunan nasional dan Pembangunan Daerah.
4. Kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan pada pengembangan Kemampuan Nasional dalam ilmu dan teknologi yang diperlukan dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas yang tersedia dalam pembangunan.

Untuk mencapai tujuan ini maka perlu ditingkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga-tenaga yang tersedia ataupun tenaga-tenaga baru, kerjasama yang erat antara lembaga-lembaga pendidikan penelitian dan pengembangan dengan pihak-pihak yang memanfaatkan hasil-hasilnya, peningkatan kegiatan pusat-

pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan.

5. Untuk mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan diusahakan penambahan fasilitas-fasilitas dengan prioritas yang tepat dan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan, baik yang bersumber dari Negara maupun dari masyarakat sendiri.
6. Pendidikan yang diarahkan untuk pembinaan Generasi Muda sebagai tunas-tunas bangsa, ditujukan agar mereka dapat menjadi pengganti generasi yang lebih baik, lebih bertanggung-jawab dan lebih mampu mengisi dan membina kemerdekaan bangsa.
7. Wadah-wadah pembinaan pemuda dilakukan melalui lingkungan keluarga, sekolah, organisasi-organisasi kepemudaan, pramuka dan lain-lainnya.

Sesuai dengan kemampuan yang ada diusahakan bertambahnya fasilitas-fasilitas dan sarana-sarana yang memungkinkan pengembangan kepemudaan.

8. Pembinaan keluarga yang sejahtera adalah sarana bagi pembinaan Generasi Muda. Untuk pembinaan keluarga yang sedemikian itu maka hak-hak Wanita dijamin serta kedudukannya dalam keluarga dan masyarakat dilindungi.

KEBUDAYAAN NASIONAL

1. Meningkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan Kebudayaan Nasional untuk memperkuat kepribadian Bangsa, kebanggaan nasional dan kesatuan nasional, termasuk menggali dan memupuk Kebudayaan Daerah sebagai unsur-unsur penting yang memperkaya dan memberi corak kepada Kebudayaan Nasional.
2. Membina dan memelihara tradisi-tradisi serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai-nilai perjuangan dan kebanggaan serta kemanfaatan nasional untuk diwariskan kepada Generasi Muda.
3. Pembinaan Kebudayaan Nasional harus sesuai dengan norma-norma Pancasila.

Disamping itu ditujukan untuk mencegah tumbuhnya nilai-nilai sosial-budaya yang bersifat feodal, juga ditujukan untuk menanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif serta dilain pihak cukup memberikan kemampuan masyarakat untuk menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan, selama tidak bertentangan dengan kepribadian Bangsa.

c. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan

Luar Negeri.

POLITIK

1. Dalam rangka memperkuat stabilisasi politik yang sehat dan dinamis, mengusahakan pembinaan Kepemimpinan Nasional yang diarahkan kepada pembinaan hubungan fungsional antara Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Lembaga-lembaga Negara tersebut dapat berfungsi sebaik-baiknya demi keserasian dan kedayagunaan hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya.
2. Mengusahakan peningkatan partisipasi Rakyat termasuk ABRI sebagai kekuatan sosial dalam pelaksanaan tugas-tugas nasional, dengan melaksanakan inti terpenting dari Demokrasi Pancasila ialah ikut sertanya Rakyat secara efektif melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara, pengawasan Rakyat secara efektif melalui Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Saluran-saluran yang efektif yang dapat digunakan dalam membina dan mengembangkan partisipasi Rakyat, antara lain adalah lembaga-lembaga seperti Lembaga Musyawarah Desa, Lembaga-Lembaga Perwakilan Rakyat, Perguruan-perguruan Tinggi dan media, dan oleh karenanya pembinaan partisipasi Rakyat dapat dilakukan dengan jalan :
 - a. Penyempurnaan wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan.
 - b. Peningkatan komunikasi antara masyarakat dengan Lembaga-Lembaga Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah.
 - c. Meningkatkan kesadaran Rakyat agar sebanyak mungkin menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum yang diatur dengan Undang-Undang.
 - d. Pembinaan Pers yang sehat yaitu Pers yang bebas dan bertanggung jawab yang memungkinkan Pers disatu pihak memberikan penerangan kepada masyarakat seluas mungkin dan seobyektif mungkin, dilain pihak merupakan saluran pendapat Rakyat yang konstruktif.
 - e. Menggiatkan dan meningkatkan peranan Perguruan-perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga penelitian dalam partisipasinya pada kegiatan pembangunan, antara lain dengan cara-cara :

- (1). Penggunaan kebebasan mimbar dalam bentuk-bentuk yang kreatif, konstruktif dan bertanggung jawab, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.
 - (2). Integrasi dan konsolidasi kegiatan-kegiatan mahasiswa, pemuda dan cendekiawan sesuai dengan profesinya dalam wadah-wadah yang efektif dimana mereka dapat menyumbangkan prestasi-prestasi serta partisipasi yang positif.
4. Dalam rangka mempercepat proses pembaharuan dan penyederhanaan organisasi kekuatan-kekuatan sosial politik, baik partai politik maupun golongan karya dewasa ini telah memperlihatkan orientasinya kepada perkembangan masyarakat yang diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan diseluruh bidang kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Oleh karena itu dalam rangka membina kehidupan politik yang efektif dan efisien bagi pelaksanaan pembangunan, maka struktur, jumlah maupun sikap mental dari organisasi-organisasi kekuatan sosial politik tersebut, telah dapat mengelompokkan diri menjadi dua Partai Politik dan satu Golongan Karya.

Dengan terdapatnya tiga pengelompokan tersebut yang merupakan wadah penampungan dari seluruh aspirasi masyarakat, maka pada Pemilihan Umum yang akan datang hanya akan ada tiga Tanda Gambar.

5. Untuk mengikut sertakan Rakyat secara maksimal dalam pembangunan, hendaknya Rakyat terutama yang berada didesa dapat diajak untuk memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan pembangunan dan diarahkan kepada masalah-masalah konkrit dan yang langsung menyangkut pembangunan.

Untuk itu, penyusunan partai-partai politik dan golongan karya disesuaikan dengan dan dalam rangka penyederhanaan partai-partai politik dan golongan karya, seperti tersebut ad 4, sehingga benar-benar partai-partai politik dan golongan karya dapat tetap menjamin persatuan dan kesatuan Bangsa serta terlaksananya percepatan pembangunan.

Pelaksanaannya akan diatur dengan Undang-Undang sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

APARATUR PEMERINTAH.

1. Pembinaan aparatur Pemerintah diarahkan agar mampu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah maupun untuk menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Untuk itu usaha-usaha penertiban dan

penyempurnaan aparatur, yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, personalia maupun sarana dan fasilitas kerja perlu dilakukan terus-menerus, sehingga keseluruhan aparatur Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Daerah, benar-benar merupakan alat berwibawa, kuat, efektif, efisien dan bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Negara dan Pemerintah serta diisi oleh tenaga-tenaga yang ahli, mampu menjalankan tugas dibidang masing-masing dan hanya mengabdikan diri kepada kepentingan Negara dan Rakyat.

2. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Hal-hal mengenai Otonomi Daerah termasuk pemilihan dan pengangkatan Gubernur/Kepala Daerah diatur dengan Undang-undang.
3. Meningkatkan secara bertahap kemampuan aparatur Daerah, terutama aparatur Pemerintah Desa, dengan fasilitas dan sarana.

HUKUM.

1. Pembangunan dibidang Hukum dalam Negara Hukum Indonesia adalah berdasar atas landasan Sumber Tertib Hukum Negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari Bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pembinaan bidang Hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan Hukum sesuai dengan kesadaran Hukum Rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian Hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukan kearah peningkatan pembinaan Kesatuan Bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan :
 - (a) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi Hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan Kesadaran Hukum dalam masyarakat.

- (b) Menertibkan fungsi Lembaga-lembaga Hukum menurut proporsinya masing-masing.
 - (c) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak Hukum.
3. Memupuk Kesadaran Hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat Pemerintah kearah Penegakan Hukum, Keadilan serta Perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia, dan Ketertiban serta Kepastian Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

HUBUNGAN LUAR NEGERI

1. Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada Kepentingan Nasional, khususnya pembangunan ekonomi.
2. Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pengembangan ketahanan nasional masing-masing, serta memperkuat wadah dan kerjasama antara negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara.
3. Mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud damai dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan perannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan Kepentingan dan Kedaulatan Nasional.

d. Bidang Pertahanan-Keamanan Nasional.

1. Pembangunan Pertahanan-Keamanan Nasional (Hankamnas) berlandaskan atas pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan bidang tersebut dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan hasil-hasil Pelita pertama.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi :

Beberapa faktor yang langsung mempengaruhi konsepsi strategi Hankamnas 1973/1974 - 1978/1979 pada umumnya serta Pembangunan bidang Hankamnas pada khususnya, ialah :

- (a) *Tingkat pertumbuhan ekonomi Nasional.*

Keadaan ini ditentukan oleh pelaksanaan dan hasil-hasil Pembangunan nasional serta kemampuan Pemerintah dalam membangkitkan

kegairahan dan partisipasi seluruh Rakyat dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Semakin cepat pertumbuhan ini semakin besar pula sarana-sarana yang dapat disediakan untuk Bidang Hankamnas dalam wujud Anggaran Belanja khususnya Anggaran Belanja Pembangunan.

Diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi selama periode 1974-1979 masih merupakan suatu pembatasan yang perlu diperhatikan dalam menyusun Anggaran Belanja bidang Hankamnas.

(b) *Tingkat perkembangan teknologi Nasional.*

Teknologi mempengaruhi kemampuan Hankamnas pada dua tingkat:

- (1) Kemampuan Nasional untuk menyediakan sendiri dan menyempurnakan alat-alat peralatan hankam yang modern sesuai dengan kebutuhan (kemampuan industri).
- (2) Kemampuan unsur-unsur Hankam dalam menggunakan dan memelihara alat-peralatan tersebut.

Selama tingkat ini rendah, maka dasar dari kekuatan Hankamnas harus diletakkan pada unsur yang tidak atau kurang memerlukan alat-peralatan besar dan modern.

Diperkirakan bahwa perkembangan teknologi Nasional pada periode ini belum mampu memberikan dukungan yang berarti bagi Pembangunan bidang Hankamnas.

(c) *Doktrin Hankamnas.*

Menurut Doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) keselamatan Negara dan Bangsa ditentukan oleh faktor Rakyat, yakni Rakyat yang patriotik, militan, terlatih dan tersusun baik, kualitas Rakyat dalam arti mental/jiwa, organisasi serta ketrampilannya ditentukan oleh kualitas dari inti kekuatan Hankamnas, yakni ABRI.

(d) *Hakekat tantangan yang dihadapi.*

- (1) Situasi dan kondisi geo-politik internasional.

Paritas nuklir dan suasana detente antara negara-negara super power mencegah timbulnya perang terbuka, tetapi suasana dan usaha-usaha detente ini belum akan menghilangkan ancaman perang terbatas dan subversi, terutama di kawasan Asia Tenggara.

Terdapat persepsi baru mengenai nilai-nilai dalam pergaulan antar negara yang bersifat lebih realistis dan pragmatis serta

menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan bersenjata.

Stabilitas di wilayah Asia akan dipengaruhi oleh negara-negara besar dengan kemungkinan antar hubungannya satu dengan yang lain lebih banyak dari pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga menghadapi kemungkinan yang banyak dalam hubungan dengan negaranegara lain di Asia dengan salah satu atau lebih dari negara-negara besar.

(2) Ancaman.

Berbentuk subversi, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Disamping itu kegiatan-kegiatan golongan ekstrim didalam negeri dapat pula berbentuk subversi atau membantu subversi asing.

(e) *Posisi geo-strategis Republik Indonesia terhadap ancaman-ancaman yang diperkirakan.*

Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan serta kedudukannya pada persimpangan jalan internasional yang sangat vital dan strategis, mempunyai keuntungan-keuntungan dan kelemahan-kelemahan tertentu dihadapkan kepada hakekat ancaman, yakni subversi.

Beberapa bagian tertentu dari Tanah Air memerlukan perhatian lebih besar dari pada bagian lain.

3. Politik dan Strategi Hankamnas 1973/1974 - 1978/1979.

(a) *U m u m.*

Politik dan strategi Hankamnas 1973/1974 - 1978/1979 harus merupakan kelanjutan logis dari Politik dan Strategis Hankamnas 1969-1973 yang intinya ialah :

(1) Politik Hankamnas :

Pengamanan Panca Krida Kabinet Pembangunan dengan Pelita pertama sebagai focusnya.

(2) Strategi Hankamnas :

a) Konsolidasi/Integrasi ABRI.

b) Penyempurnaan penyelesaian masalah Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) dan mulai memperhatikan masalah keamanan luar.

(b) *Politik Hankamnas.*

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan keperluan adanya garis kontinuitas yang logis dan konsisten dari Politik dan Strategi hankamnas untuk periode 1973/1974 - 1978/1979 adalah pengamanan Strategi Nasional dengan Pelita kedua sebagai focus.

(c) *Strategi Hankamnas.*

Untuk melaksanakan Politik Hankamnas tersebut diatas maka Strategi Hankamnas ialah : Penyusunan kekuatan Hankamnas yang mampu :

- (1) Mendukung perjuangan kepentingan-kepentingan Nasional diforum internasional.
- (2) Mengatasi ancaman-ancaman subversi dari luar dan dari dalam serta segala macam hambatan lainnya.

(d) *Tugas-tugas pokok ABRI.*

Untuk dapat melaksanakan Politik dan Strategi Hankamnas tersebut diatas, maka ABRI sebagai inti dan pembina dari kekuatan-kekuatan Hankamnas bertugas pokok :

- (1) Meningkatkan kualitas operasional, administrasi dan management dalam dirinya sebagai suatu organisasi yang sudah terintegrasi.
- (2) Mengamankan Pelita kedua dan ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional.
- (3) Menghancurkan sisa-sisa G-30-S/PKI serta subversi lainnya dan mengatasi hambatan-hambatan terhadap keamanan dan kesuksesan dari segala Program-program Nasional.
- (4) Ikut serta memelihara kestabilan di Asia Tenggara untuk mendukung politik luar negeri yang bebas aktif, bertujuan untuk menggalang ketahanan nasional Negara-negara Asia Tenggara dan Negara-negara ASEAN sebagai focusnya, sebagai dasar bagi ketahanan regional Asia Tenggara.
- (5) Terus meningkatkan kemampuan ABRI sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan sosial.

4. *Kebijaksanaan.*

(a) *Tujuan*

Membangun suatu kekuatan Hankamnas dengan kualitas dan dalam kuantitas yang diperlukan untuk memungkinkan terlaksananya Politik dan Strategi Hankamnas dan tugas-tugas pokok ABRI.

(b) *Sasaran Fisik*

- (1) ABRI sebagai inti dari kekuatan-kekuatan fisik Hankamnas yang tinggi kualitas mental/jiwa, fisik materiil dan kemampuan teknisnya.
- (2) Kekuatan Rakyat yang sebagian sudah mulai tersusun, terlatih dan berfungsi dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas pokok ABRI.
- (3) Prasarana produksi dan pemeliharaan bagi sebagian alat Pertahanan-Keamanan.
- (4) ABRI sebagai kekuatan sosial ikut serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (Ipoleksosbud).

(c) *Sasaran Kemampuan-kemampuan.*

- (1) ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan.
 - a. Kemampuan strategis untuk mematahkan semua hakekat ancaman tersebut diatas meliputi seluruh wilayah Nasional dan kemampuan strategis terbatas untuk penugasan diluar wilayah Nasional.
 - b. Kemampuan mengetahui dengan cepat, mengenal, mengikuti dan menghancurkan ancaman-ancaman yang melanggar kedaulatan di udara secara terbatas khususnya penerbangan-penerbangan untuk tujuan subversi dan infiltrasi.
 - c. Kemampuan menggalang kondisi yang menguntungkan dan ikut mensukseskan pelaksanaan Strategi Nasional.
 - d. Kemampuan mengembangkan kekuatan aktif ABRI dalam waktu singkat setiap saat apabila dikehendaki.
- (2) Kekuatan Rakyat.
 - a. Membantu TNI dalam penyelenggaraan tugas-tugas pertahanan.
 - b. Membantu POLRI dalam penyelenggaraan tugas-tugas Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
- (3) Prasarana.

- a. Kemampuan produksi senjata ringan modern beserta amunisinya, spareparts tertentu dari alat-alat berat, bahan-bahan alat-alat instruksi.
 - b. Kemampuan pemeliharaan sampai dengan tingkat tertinggi dari semua peralatan-peralatan yang digunakan oleh ABRI.
- (4) ABRI sebagai kekuatan sosial :
- a. Kemampuan untuk bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya, secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan Pembangunan Nasional.
 - b. Kemampuan turut serta menggalang kondisi yang mantap dan harmonis untuk peningkatan Ketahanan Nasional.
- (d) *Program Induk.*

Untuk dapat mencapai sasaran kemampuan-kemampuan tersebut, maka usaha-usaha pembangunan dituangkan dalam Program-program Induk yang pada dasarnya merupakan program-program terintegrasi ialah :

- (1) Program Induk Kekuatan.
- (2) Program Induk Prasarana ABRI.
- (3) Program Induk Prasarana Nasional.

E. PELAKSANAAN PELITA KEDUA.

Sebagai pelaksanaan dari Pola Umum Pembangunan Lima Tahun ini, disusunlah oleh Presiden/Mandataris Majelis Permujsyawaratan Rakyat Repelita kedua yang akan merupakan rencana pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan diberbagai bidang dalam tahun 1974-1979.

Adapun program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan tersebut untuk setiap tahun dituangkan dalam rencana operasional dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berimbang.

Dalam meningkatkan tanggung jawab keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan wajib meningkatkan kegiatannya sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

BAB V

PENUTUP.

Berhasilnya usaha-usaha Pembangunan Nasional pada akhirnya akan tergantung dari tanggapan, pengertian, kesadaran, keterlibatan dan partisipasi Rakyat Indonesia dalam menyambut tantangan pembangunan secara positif guna

meratakan jalan bagi Generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 22 Maret 1973

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

K.H. Dr. IDHAM CHALID

Wakil Ketua

t.t.d

Drs. SUMISKUM

Wakil Ketua

t.t.d

J. NARO, S.H.

Wakil Ketua

t.t.d.

DOMO PRANOTO

Wakil Ketua

t.t.d.

KARTIDJO

Wakil Ketua

t.t.d.

Mh. ISNAENI